

BAB III

ANALISIS SASARAN STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perikanan dan Pangan

Beberapa permasalahan yang timbul dari tupoksi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sumberdaya Perikanan di perairan laut kota belum dikelola dengan baik dan berkelanjutan, ada kecenderungan pemanfaatan yang berlebihan (over fishing). Adanya indikasi pengrusakan fisik habitat karang.
- b. Produktifitas hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.
- c. Kemiskinan masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan, disebabkan oleh belum berkembangnya diversifikasi usaha pada rumah tangga nelayan serta belum tumbuhnya kesadaran budaya menabung sebagai sumber investasi.
- d. Rendahnya perhatian perbankan dalam mendukung pembangunan Perikanan dan Pangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program dari RPJMD Kota Padang

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Dengan

demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun tabel faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Koreksi Bappeda : Penjabaran pada Bab 3.2 cukup mempersandingkan program wako/wawako dengan program pada SKPD yang mendukung pencapaian target program unggulan wako/wawako)

Tabel 5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Faktor Penghambat/Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan Wilayah Barat Sumatera			
	Program pelatihan pengelolaan usaha perdagangan dan mutu barang	Terbatasnya pelaksanaan pelatihan usaha perdagangan dan mutu barang terhadap pelaku	Terbatasnya kemampuan aparatur Perikanan dan Pangan yang mampu	Cukup banyak pelaku UMKM KP yang memerlukan kemampuan untuk

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas kelautan dan perikanan	Faktor Penghambat/Pendorong	
			memberikan pelatihan usaha perdagangan baik dalam / luar negeri	mengelola perdagangan dan mutu
	Program Pengawasan mutu barang	Terbatasnya Operasional pelaksanaan SOP terkait dengan mutu hasil perikanan	Belum terbentuknya Pokja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Sudah ada SDM aparatur yang terlatih dan bersertifikat, serta adanya fasilitas SP3N
	Program kerjasama perdagangan lintas daerah	Masih lemahnya pelaksanaan Regulasi terkait dengan perdagangan SDKP	Belum adanya petugas pemantau perdagangan lintas daerah	Sudah ada regulasi terkait perdagangan lintas daerah tapi perlu dilakukan revisi sesuai kondisi saat ini.
	Program kerjasama perdagangan lintas negara	Terbatasnya kerja sama perdagangan antar negara	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha Perikanan dan Pangan memenuhi prasyarat / kondisi dalam perdagangan	Memiliki Sumberdaya KP yang dibutuhkan oleh perdagangan lintas negara antara lain: ikan

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor Penghambat/Pendorong	
			hasil KP lintas negara	tuna,kerapu, kepiting, ikan hias dan komoditas hasil KP lainnya
	Program promosi investasi dan produk lokal	Terbatasnya frekuensi even promosi investasi dan hasil KP serta sumberdaya bahari yang diikuti	Terbatasnya sumber dana untuk mendukung promosi dan investasi produk lokal yang berkelanjutan. Di samping itu terbatasnya partisipasi pelaku usaha untuk mengikuti even promosi	Terdapatnya potensi Perikanan dan Pangan yang mempunyai nilai jual, di samping itu peluang promosi investasi produk lokal di luar daerah cukup banyak
	Program penataan kawasan industri	Koordinasi antara Pemerintah Pusat (lingkup kementerian) dengan SKPD yang terkait di daerah dalam pengembangan industrialisasi di kawasan	Belum optimalnya komitmen instansi terkait di daerah yang mendukung pelaksanaan program Minapolitan dengan instansi terkait di tingkat pemerintah pusat	Telah ada Master Plan Minapolitan yang mendukung industrialisasi KP dan telah diterbitkan SK Menteri KP tentang Penetapan

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas minapolitan belum optimal	Faktor Penghambat/Pendorong	
				Kawasan Minapolitan
	Program pembinaan dan pendampingan industri kecil berbasis sumberdaya lokal dan ekonomi kreatif	Pembinaan dan pendampingan industri UMKM KP masih terbatas	1. Industri masih terbatas 2. Pendanaan / Pendampingan terbatas	Peluang Usaha Industri UMKM KP sangat/cukup terbuka
	Program pelatihan pengelolaan kawasan agroindustri	Program Pelatihan Pengelolaan kawasan agro fisheries industry masih tahap pengembangan	Belum ada SOP dalam pengelolaan kawasan agro fisheries industry dan sarana dan prasarana pelatihan di kawasan agro fisheries industry karena ketersediaan anggaran belum memadai	1. Sudah ada Sentra Pengolahan Industri Perikanan di Kawasan Pasie nan Tigo (UPTD SP3N) 2. Telah ada 131 UPI
	Program pengembangan kawasan agrowisata	Belum terbitnya Perda Zonasi	Kawasan Pulau – pulau kecil yang	Sudah ada Perwako No.

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas yang memfasilitasi pengembangan eko wisata bahari (eco fisheries tourism)	Faktor Penghambat/Pendorong	
			menjadi destinasi wisata bahari masih dikuasai oleh kaum. Dukungan dari stake holder (pariwisata) perlu lebih maksimal	224 Tahun 2011 ttg Pencadangan KKLD Sudah Ada Fasilitas Penangkaran Penyu Sudah ada fasilitas armada yg mendukung kepariwisataan bahari kepada kelompok masyarakat
3	Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan			
	Program pemberdayaan kelompok usaha	Pemberdayaan / pembinaan kelompok usaha KP Belum Optimal	Terbatasnya jumlah SDM Penyuluh Perikanan Terbatasnya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Perikanan	Sudah ada kelembagaan berupa 84 KUB, 80 Pokdakan dan 49 Poklahsar serta 19 Pokmaswas

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor Penghambat/Pendorong	
			Rendahnya komitmen dari kelompok masyarakat	
	Program Pelatihan pemanfaatan sumberdaya lokal	Keterbatasan Anggaran untuk pelatihan sumberdaya lokal	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pelatihan	SDA untuk dimanfaatkan tersedia dan SDM untuk trainee tersedia (242 kelompok) SDM sebagai trainer tersedia
	Program bantuan pembiayaan dari dana bergulir, lembaga keuangan mikro dan koperasi	Pelaksanaan Program bantuan pembiayaan dari dana bergulir, lembaga keuangan mikro dan koperasi belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perguliran fasilitas yang diberikan. Komitmen (lembaga pembiayaan) perbankan terhadap pelaku usaha KP sangat rendah	Sudah ada program/ pendanaan untuk fasilitasi lembaga keuangan mikro Sudah ada SDM untuk Konsultan Keuangan Mikro Bank (KKMB) khusus perikanan

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Program pengolahan sumberdaya lokal	Permasalahan Pelayanan Dinas Masih terbatasnya diversifikasi produk olahan dari sumberdaya lokal	Faktor Penghambat/Pendorong	
			Masih kurangnya kemampuan pelaku usaha KP dalam menginovasi /mengembangkan potensi sumberdaya lokal	SDA untuk dimanfaatkan tersedia dan SDM untuk trainee tersedia sebagai trainer tersedia
	Program pelatihan manajemen bagi wirausahawan muda	Terbatasnya pelayanan pelatihan manajemen bagi wirausahawan muda KP	Terbatasnya anggaran Rendahnya minat generasi muda untuk menjadi pelaku usaha KP	Sudah ada menumbuhkan wirausaha muda seperti : Regenerasi Nelayan Sudah ada lembaga pelatihan Mandiri KP
	Program pelatihan sistem informasi dan jaringan usaha	Sistem Informasi dan Jaringan Usaha KP masih belum berkembang	Terbatasnya SDM untuk menyiapkan pelayanan data informasi dan jaringan usaha Rendahnya SDM dan minat pelaku usaha KP dalam memanfaatkan jaringan informasi	Sudah ada jejaring sistem informasi KP

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor Penghambat/Pendorong	
			Perikanan dan Pangan	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumbar

Dalam penyusunan Rancangan awal RENSTRA Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang telah mengacu kepada RENSTRA Kementerian Perikanan dan Pangan terutama dalam pengembangan pembangunan perikanan yang berbasis Industrialisasi dan *Blue Economy* di Kawasan Minapolitan. Begitu juga telah mengacu pada RENSTRA Perikanan dan Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai sentra tuna yang terkemuka di Pantai Barat Sumatera.

Dalam penyusunan Rancangan awal RENSTRA Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang telah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, Provinsi Sumatera Barat ,menempatkan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. terutama untuk mendukung Misi :3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang disamping Program Prioritas Nasional, Kementerian Perikanan dan Pangan terkait dengan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, yakni Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; Lintas Bidang Perubahan Iklim Global dan Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan. Pembangunan Perikanan dan Pangan berada dalam lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Lingkup

pembangunan bidang SDA dan LH meliputi (1) revitalisasi pertanian, dan (2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Dan diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu kepada Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Tata Ruang Tata Kota Padang 2010 – 2030, maka Perda ini telah memfasilitasi ruang dan zonasi yang terkait dengan pengaturan fungsi dan tugas pokok Dinas Perikanan dan Pangan seperti pengaturan tentang Zonasi di wilayah pesisir, Kawasan Konservasi dan Kawasan Minapolitan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga telah mengakomodir pembangunan yang berwawasan lingkungan wilayah pesisir sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan- pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang

dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS a). Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, b). Peningkatan ketersediaan data lautan dan c). informasi survei sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi a). Peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut, b). Pengelolaan meteorologi penerbangan dan maritim BMKG, c). Penelitian dan pengembangan geologi kelautan; dan d). Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Kota Padang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan Perikanan dan Pangan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari identifikasi permasalahan internal dan eksternal pada BAB sebelumnya, maka matriks analisis SWOT yang dapat disusun adalah sebagai berikut ;

Tabel

Matriks SWOT masalah internal dan eksternal

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	a) Potensi bahari yang terdiri dari luas laut 720 km ² dan 19 buah pulau-pulau kecil (PERDA No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW). b) Sumberdaya air tawar yang begitu besar, sehingga dapat menopang usaha budidaya perairan.	a) Secara kuantitas SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang masih dirasakan belum memadai, baik tenaga administrasi maupun tenaga fungsional. b) Rendahnya hasil produksi perikanan tangkap pada jalur penangkapan I dan II, karena padatnya armada perikanan

<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> c) Potensi sumberdaya ikan yang besar di jalur penangkapan ikan III dan belum terkelola d) Jumlah penduduk Kota Padang yang cukup banyak, sehingga kebutuhan pangan dapat menjadikan sumber pendapatan bagi pemasar produk pangan. a) Tersedianya lahan pertanian yang cukup luas untuk sarana penumbuhan produk pangan. 	<p>tangkap yang masih bersifat tradisional sehingga tidak dapat menjangkau jalur penangkapan III.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Kualitas benih ikan yang masih rendah dan mudah terserang penyakit, karena induk ikan yang telah tua di Usaha Perbenihan Rakyat (UPR). d) Teknologi penangkapan dan budidaya ikan yang masih rendah. e) Armada Perikanan tangkap yang masih bersifat tradisional. f) Kurangnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan. g) Masih lemahnya SDM pelaku usaha perikanan. h) Penegakan hukum terhadap regulasi perikanan tangkap yang masih rendah. i) Masih rendahnya akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. j) Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. k) Alih fungsi atau konfersi lahan pertanian. b) Masih terdapatnya kelurahan yang rentan rawan pangan dan harus mendapat penanganan daerah rawan pangan. c) Adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor. d) Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah penduduk Kota Padang yang cukup besar yaitu 876.678 jiwa, sehingga terbuka peluang untuk menyerap produksi perikanan yang berdaya saing. b) Masih tersedianya jalur penangkapan ikan potensial di jalur penangkapan ikan III. c) Besarnya potensi lahan sumberdaya perikanan budidaya air tawar dan air laut. d) Bahan baku ikan yang mudah didapat, sehingga dapat menopang peningkatan pemasaran produk hasil olahan ikan. 	<p style="text-align: center;">(Strategi SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan peranserta sektor swasta dalam mengelola usaha Perikanan dan Pangan. b) Melakukan peningkatan kapasitas teknologi penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan III. c) Melakukan diversifikasi usaha budidaya dan usaha pengolahan ikan yang berdaya saing. d) Optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang sebagai destinasi eko-wisata bahari. 	<p style="text-align: center;">(Strategi WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis bagi aparatur Dinas Perikanan dan Pangan. b) Modernisasi armada dan alat tangkap nelayan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan III. c) Pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan secara optimal dengan pendekatan dengan pihak swasta dan instansi terkait. d) Revitalisasi kualitas induk ikan pada UPR dan BBI Bungus . e) Intensifikasi usaha budidaya pada lahan-lahan marginal yang produktif. f) Optimalisasi penanganan produk hasil

<p>e) Terbukanya peluang pemanfaatan jasa industri Perikanan dan Pangan oleh masyarakat yang cukup besar.</p> <p>f) Potensi industri lainnya, yang membutuhkan unsur penopang dari produk perikanan dan pangan.</p>		<p>perikanan dengan penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin.</p> <p>g) Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>h) Fasilitasi pendekatan modal skala kecil untuk usaha perikanan dengan perbankan.</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T)</p> <p>a) Terbatasnya pertumbuhan armada penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh pelaku utama Kota Padang sehingga beroperasinya kapal - kapal nelayan yang datang dari provinsi lain dengan alat tangkap yang lebih canggih dengan GT yang lebih besar, sehingga hasil tangkapan didaratkan di daerah/provinsi asal mereka. Selanjutnya menjadi penyebab terjadinya konflik sosial antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang.</p> <p>b) Menurunnya intensifikasi budidaya perikanan karena laju kenaikan harga pakan tidak seimbang dengan kenaikan harga jual ikan sehingga banyak sarana produksi yang tidak dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan terutama sarana kolam air deras (KAD) sehingga ada peluang untuk memperkenalkan teknologi pembuatan pakan yang lebih murah yang berdasarkan pada bahan baku lokal.</p> <p>c) Harga pakan yang tinggi mengakibatkan berkurangnya aktifitas pembudidaya berskala rumah tangga.</p> <p>d) Adanya gejala tingginya tingkat kematian ikan di masyarakat. Hal ini karena masalah lingkungan kolam ataupun penerapan teknologi pakan.</p> <p>e) Adanya <i>illegal fishing</i> yang menyebabkan degradasi lingkungan Perikanan dan Pangan.</p> <p>f) Masih rendahnya akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan</p>	<p style="text-align: center;">(Strategi ST)</p> <p>a) Restrukturisasi armada penangkapan, serta sarana dan prasarana tempat pendaratan Perikanan Tuna.</p> <p>b) Intensifikasi pengawasan wilayah laut secara terpadu serta penegakan hukum dan aturan mengenai illegal fishing.</p> <p>c) Revitalisasi penyediaan sistem informasi harga pasar bahan dan produk penunjang kegiatan usaha perikanan.</p> <p>d) Peningkatan pengetahuan petani ikan untuk penyediaan diversifikasi pakan alami usaha budidaya ikan melalui teknologi tepat guna.</p> <p>e) Peningkatan pengetahuan petani ikan akan pemberantasan penyakit ikan serta pengelolaan sumberdaya lingkungan perairan.</p>	<p style="text-align: center;">(Strategi WT)</p> <p>a) Peningkatan kapasitas kualitas sumberdaya manusia Perikanan dan Pangan khususnya PPNS bidang Perikanan dan Pangan.</p> <p>b) Revitalisasi armada pengawasan Perikanan dan Pangan.</p> <p>c) Revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan.</p> <p>d) Optimalisasi sistem informasi pengawasan terpadu dengan mengaktifkan kelompok masyarakat pengawas.</p> <p>e) Rehabilitasi ekosistem sumberdaya Perikanan dan Pangan.</p>

<p>g) Penegakan hukum terhadap regulasi perikanan tangkap yang masih rendah.</p> <p>h) Dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan.</p> <p>l) Anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan</p> <p>m) Anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan</p>		
---	--	--

Selanjutnya matriks tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ;

a. Strategi SO ;

1. Meningkatkan peran serta sektor swasta dalam mengelola usaha Perikanan dan Pangan (penangkapan, budidaya dan pengolahan produk hasil perikanan) (0,72), (0,27).
2. Melakukan peningkatan kapasitas teknologi penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan III (0,27), (0,135).
3. Melakukan diversifikasi usaha budidaya dan usaha pengolahan ikan yang berdaya saing.

b. Strategi ST ;

1. Restrukturisasi armada penangkapan, serta sarana dan prasarana tempat pendaratan Perikanan Tuna.

2. Intensifikasi pengawasan wilayah laut secara terpadu serta penegakan hukum dan aturan mengenai illegal fishing.
3. Revitalisasi penyediaan sistem informasi harga pasar bahan dan produk penunjang kegiatan usaha perikanan.
4. Peningkatan pengetahuan petani ikan untuk penyediaan diversifikasi pakan alami usaha budidaya ikan melalui teknologi tepat guna.
5. Peningkatan pengetahuan petani ikan akan pemberantasan penyakit ikan serta pengelolaan sumberdaya lingkungan perairan.

c. Strategi WO ;

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis bagi aparatur Dinas Perikanan dan Pangan.
2. Modernisasi armada dan alat tangkap nelayan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan III.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana pendaratan ikan secara optimal dengan pendekatan dengan pihak swasta dan instansi terkait.
4. Revitalisasi kualitas induk ikan pada UPR dan BBI Bungus .
5. Intensifikasi usaha budidaya pada lahan-lahan marginal yang produktif.
6. Optimalisasi penanganan produk hasil perikanan dengan penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin.
7. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Fasilitasi pendekatan modal skala kecil untuk usaha perikanan dengan perbankan.

d. Strategi WT ;

1. Peningkatan kapasitas kualitas sumberdaya manusia Perikanan dan Pangan khususnya PPNS bidang Perikanan dan Pangan.
2. Revitalisasi armada pengawasan Perikanan dan Pangan.
3. Revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan.
4. Optimalisasi sistem informasi pengawasan terpadu dengan mengaktifkan kelompok masyarakat pengawas.
5. Rehabilitasi ekosistem sumberdaya Perikanan dan Pangan.

Kemudian dari hasil identifikasi masing-masing strategi tersebut dilakukan pembobotan ;

Tabel.....

Pembobotan Faktor-faktor Internal

No.	Kekuatan (S)	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1.	Potensi bahari yang terdiri dari luas laut 720 km2 dan 19 buah pulau-pulau kecil (PERDA No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW).	4	0,18	0,72	1
2.	Sumberdaya air tawar yang begitu besar, sehingga dapat menopang keberlanjutan usaha budidaya perairan.	4	0,18	0,72	2
3.	Potensi sumberdaya ikan yang besar di jalur penangkapan ikan III dan belum terkelola	3	0,09	0,27	3
No.	Kelemahan (W)	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1.	Secara kuantitas SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang masih dirasakan belum memadai.	3	0,045	0,135	8
2.	Rendahnya hasil produksi perikanan tangkap pada jalur penangkapan I dan II.	3	0,045	0,135	9
3.	Masih belum beroperasinya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Anai.	2	0,045	0,135	10
4.	Kualitas benih ikan yang masih rendah dan mudah terserang penyakit.	2	0,045	0,135	11
5.	Teknologi budidaya di lahan marginal belum berkembang.	3	0,09	0,27	4
6.	Belum berkembangnya teknologi rantai dingin.	3	0,09	0,27	6
7.	Belum terlegisasinya tata ruang wilayah pesisir dan laut (zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil).	3	0,09	0,27	5
8.	Belum adanya usaha perikanan yang dinilai <i>bankable</i> oleh perbankan.	3	0,09	0,27	7
			1,00		

Tabel

Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal

No	Peluang (O)	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1.	Jumlah penduduk Kota Padang yang cukup besar yaitu 876.678 jiwa, sehingga terbuka peluang untuk menyerap produksi perikanan yang berdaya saing.	4	0,22	0,88	1
2.	Letak Kota Padang di barat pulau Sumatera berdekatan dengan negara tetangga.	3	0,055	0,165	6
3.	Terbukanya peluang pemanfaatan jasa industri Perikanan dan Pangan (industri maritim) lainnya seperti industri wisata bahari, jasa angkutan bahari, olahraga bahari, dan pengelolaan destinasi pulau-pulau kecil.	4	0,22	0,88	2
No	Ancaman (T)	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1.	Terbatasnya pertumbuhan armada penangkapan tuna di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh pelaku utama Kota Padang.	3	0,11	0,33	3
2.	Masih ada indikasi (laporan dari nelayan) adanya kapal berbendera asing yang melakukan tangkapan ikan di kawasan ZEE 572 di depan wilayah perairan Kota padang atau Sumatera Barat.	3	0,11	0,33	5
3.	Menurunnya intensifikasi budidaya perikanan karena laju kenaikan harga pakan tidak seimbang dengan kenaikan harga jual ikan.	3	0,055	0,165	7
4.	Harga pakan yang tinggi mengakibatkan berkurangnya aktifitas pembudidaya berskala rumah tangga.	2	0,055	0,11	8
5.	Adanya gejala tingginya tingkat kematian ikan di masyarakat. Hal ini karena masalah lingkungan kolam ataupun penerapan teknologi pakan.	2	0,055	0,11	9
6.	Adanya <i>illegal fishing</i> yang menyebabkan degradasi lingkungan Perikanan dan Pangan.	3	0,11	0,33	4
			1,00		

Oleh sebab itu beberapa isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Alat tangkap dan armada penangkapan ikan yang masih bersifat tradisional.

Sekitar 65 % armada hanya bisa menangkap di wilayah 4 mil. Untuk upaya tersebut langkah awal harus dilakukan revitalisasi armada secara bertahap sehingga pemanfaatan SDA di laut lepas lebih optimal.

2. Degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pemukiman penduduk yang padat wilayah pesisir dan laut, merusak ekosistem laut dan pesisir oleh masyarakat penyebab degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan laut.

3. Lemahnya kelembagaan kelompok, menyebabkan lambatnya penyerapan teknologi dan informasi oleh pelaku usaha. Untuk itu diperlukan peranan **Penyuluh Perikanan** sebagai roda penggerak pemberdayaan kelembagaan tersebut. Dengan adanya kelembagaan yang telah berkembang akan menjadi cikal bakal pembentukan kelembagaan ekonomi.

4. Belum terbentuknya sistem informasi pasar perikanan yang mudah diakses. Pasar merupakan sarana untuk interaksi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu ketersediaan pasar dan sistem informasi harga pasar yang mudah diakses adalah hal utama untuk meningkatkan perdagangan dan pengembangan daya saing produk hasil perikanan.

5. Kondisi alam yang rentan bencana. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana baik di darat maupun di wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai.

6. Kurangnya keterampilan sumberdaya manusia pelaku usaha Perikanan dan Pangan dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk berproduksi. Oleh sebab itu pelatihan-pelatihan singkat yang padat karya, padat tenaga harus dimaksimalkan.

7. Belum optimalnya penangkapan Tuna pada pantai barat sumatera. Pantai barat sumatera merupakan kawasan yang belum over fishing untuk perikanan Tuna, terutama Tuna untuk tujuan ekspor.

8. Belum optimalnya pemanfaatan ruang produktif untuk usaha budidaya ikan.

9. Industrialisasi pengolahan hasil perikanan masih belum tumbuh.

10. Pengembangan Industri wisata berbasis kebaharian masih belum optimal.

11. Usaha perikanan yang tidak bankable, sehingga susah untuk memperoleh modal.
12. Harga Pakan ikan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga ikan